

Perintahkan Data Sekolah Rusak , Usulkan Perbaikan Pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



borneonews.co.id

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi seluruh bangunan satuan pendidikan (sekolah) yang rusak dan perlu rehab agar bisa diusulkan masuk dalam program perbaikan menggunakan dana APBD.

”Saya sudah minta Disdik untuk menginvetarisir seluruh bangunan sekolah di Kotim yang rusak parah. Misalnya, toiletnya, ruang kelasnya, termasuk rumah dinas guru yang rusak didata agar bisa diketahui anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan,” kata Halikinnor, baru-baru ini.

Halikin mengatakan, Pemkab Kotim akan lebih memprioritaskan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. ”Pendidikan dan kesehatan ini akan lebih saya perhatikan untuk dibenahi,” ujarnya.

Kepala Disdik Kotim Suparmadi mengatakan, pihaknya masih melakukan inventarisasi dengan mendata semua barang-barang di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Mulai dari sarana dan prasarana serta tenaga guru yang sudah rusak dan perlu perbaikan.

”Sudah kami lakukan inventarisasi. Sampai sekarang masih berproses. Pendataan itu disinkronkan dengan data real di data pokok pendidikan (dapodik). Operator kami yang menganalisis kebutuhan sekolah dengan mengklasifikasikannya dalam beberapa kategori kerusakkan berat, sedang, hingga ringan,” kata Suparmadi, Kamis (21/10).

Data tersebut akan dipilah. Sekolah yang masuk skala prioritas akan diusulkan melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). ”Mana saja satuan pendidikan di Kotim yang kondisinya rusak berat dan sedang, akan diusulkan masuk skala prioritas. Misalkan, rehab bangunan ruang kelas, toilet, mebel, rumah dinas guru dan sarana prasarana lainnya yang kondisinya rusak, menjadi sasaran pemerintah untuk dilakukan perbaikan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sarana pendidikan di Kotim untuk taman kanak-kanak tercatat sebanyak 306 unit, SD 268 unit, dan SMP sebanyak 108 unit. Suparmadi menambahkan, perbaikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan tak hanya mengandalkan APBD dan APBN. Namun, diperlukan peran swasta untuk membantu melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

”Keterlibatan dengan pihak perusahaan juga sangat diperlukan, khususnya dalam meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Salah satu bangunan yang perlu perhatian, yakni SDN 4 Mentaya Seberang di Jalan Lingkungan Raya, Desa Seragam Jaya, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Bangunan berkontruksi kayu yang rusak parah itu difungsikan sebagai ruang perpustakaan.

Camat MB Ketapang Eddy Hidayat Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Seranau mengatakan, bangunan perpustakaan itu sudah mengalami kerusakan sekitar setengah tahun terakhir. Atap bangunan tertiuip angin kencang, lantai bangunan sudah ditumbuhi rumput dengan tanah gambut, karena sudah sekian lama tak difungsikan.

”Bangunan itu dulunya difungsikan sebagai perpustakaan, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Untuk sementara perpustakaan dipindahkan ke ruangan lain,” kata Eddy.

Eddy menuturkan, sebelumnya pihak sekolah sudah pernah mengusulkan ke musrenbang dan disampaikan ke Disdik Kotim. Namun, hingga kini bangunan itu belum diperbaiki, bahkan nyaris ambruk dan tidak layak difungsikan sebagai ruang perpustakaan.

”Sebenarnya pihak desa sudah mau memperbaiki, tetapi tidak bisa menggunakan dana desa, karena itu aset milik Disdik Kotim. Tidak hanya SDN 4 Mentaya Seberang, SDN yang lain juga pernah mengusulkan untuk perbaikan bangunan dan usulan mebel, namun sampai saya pindah tugas belum ada perubahan,” ujarnya.

Menurut data semester 2021/2022 yang dikutip dari <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id>, area SDN 4 Mentaya Seberang memiliki luas tanah 3 meter persegi dan memiliki fasilitas ruang kelas sebanyak lima ruang yang terdiri dari 6 rombongan belajar. Siswa laki-laki berjumlah 15 dan perempuan berjumlah 7 siswa. Sedangkan, tenaga pendidik tersedia enam guru.

”Desa Seragam Jaya ini penduduk yang paling sedikit. SDN 4 Mentaya Seberang ini satu-satunya SD di sana yang jumlah siswanya tidak banyak. Walaupun bangunan perpustakaan itu sudah tidak berfungsi, namun tidak sampai mengganggu proses aktivitas belajar mengajar siswa,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.radarsampit.com/>, Perintahkan Data Sekolah Rusak, Usulkan Perbaikan Pakai APBD, Jumat, 22 Oktober 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, Dinas Pendidikan Kotim Masih Data Banguna Sekolah Rusak, Minggu, 24 Oktober 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK.07/ 2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan bahwa :
 - (1) Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).
 - (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD.
 - (3) Anggaran belanja fungsi pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dialokasikan dalam APBD sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
- Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK.07/ 2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebutkan bahwa Anggaran belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pegawai;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan keuangan; dan
 - f. belanja hibah.
- Pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK.07/ 2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - (1) belanja pengadaan lahan dan bangunan untuk sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - (2) belanja pengadaan aset kependidikan lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.